



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ **40** /Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan berdasarkan surat dari Sekretariat Daerah Nomor 900/42/Keu-Setda/1/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Usulan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati ;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Apabila Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhalangan, maka yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat tertentu untuk menandatangani Surat Perintah Membayar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 08 Januari 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 900 / 40 / Kpts / BPT-PS / 2020
 TANGGAL : 08 JANUARI 2020
 TENTANG : PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
 PADA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGLOLOAN KEUANGAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1	Ir. ERIZON, MT NIP. 19630323 199001 1 005	Sekretaris Daerah	Pengguna Anggaran	Seluruh Program dan Kegiatan pada Perangkat Daerah (Sekretariat Daerah)
2	HAMDI, SPT.,M.Si NIP. 19740530 200003 1 005	Asisten Administrasi Umum	Kuasa Pengguna Anggaran	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1. Optimalisasi Fungsi Koordinasi Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum 2. Optimalisasi Fungsi Koordinasi Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat 3. Optimalisasi Fungsi Koordinasi Bidang Umum, Organisasi, dan Keuangan
3	Hj. ERMIDA ZISWATI, SE.MM NIP. 19651111 199003 2 006	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Kuasa Pengguna Anggaran	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1. Pemanfaatan dan Optimalisasi dan Pemanfaatan Fungsi Staf Ahli Bupati
4	WELDI, S.Sos.,M.M NIP. 19641028 199003 1 004	Kepala Bagian Keuangan	Kuasa Pengguna Anggaran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 5. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS 6. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan
5	JUNILIA ARMAYANTI.,S.Kom NIP. 19800623 200501 2 015	Kepala Bagian Organisasi	Kuasa Pengguna Anggaran	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Program Penataan Kelembagaan dan Ketatausahaan Pemerintah Daerah 1. Penataan dan Penguatan Lembaga 2. Penataan Jabatan Perangkat Daerah Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Aparatur 1. Penyusunan LAKIP Kabupaten Pesisir Selatan 2. Money e-SAKIP Kabupaten Pesisir Selatan

6 ALWIS DARWIS, SH NIP. 19620918 198503 1 006	Kepala Bagian Umum	Kuasa Pengguna Anggaran	Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik 1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Peningkatan Manajemen Pelayanan Publik Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1. Peningkatan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8. Penyediaan Makanan dan Minuman 9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rumah Dinas (KDH) 11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (KDH) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 2. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 1. Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 1. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintahan Non Departemen/Luar Negeri 2. Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Peningkatan Disiplin Aparatur (KDH) 1. Pengadaan Pakaian Dinas dan Hari-Hari Tertentu Beserta Kelengkapannya (KDH) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 2. Dokumentasi Kegiatan Pemerintahan Daerah 3. Publikasi dan Promosi Daerah
7 [REDACTED] NIP. 19700921 199303 1 002	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	Kuasa Pengguna Anggaran	

8	NASWIN HAKIM, SH NIP. 19661011 198602 1 002	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kuasa Pengguna Anggaran	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 1. Peningkatan Etos Kerja Keprotokolan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 1. Fasilitas Lelang dan Klarifikasi PBJ 2. Evaluasi, Laporan dan Pengelolaan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa 3. Pembinaan dan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa
9	Ir. HENDRI HANAFI NIP. 19640417 199203 1 009	Kepala Bagian Pembangunan dan Infrastruktur	Kuasa Pengguna Anggaran	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1. Pengendalian dan Koordinasi Program Pembangunan Daerah 2. Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan 3. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah 4. Penyusunan Prosedur Kegiatan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 1. Fasilitas Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik
10	HELLEN H. SARI, SE.,AK, M.Ec.,Dev NIP. 19780528 200501 2 004	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Kuasa Pengguna Anggaran	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tata Niaga Bahan Bakar Bersubsidi Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1. Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1. Forum Pengendalian Harga dan Inflasi Daerah 2. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan BUMD, Koperasi, UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan Program perencanaan pembangunan ekonomi 1. Koordinasi Peningkatan Ekonomi Pesisir Selatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Alam 1. Monitoring dan Evaluasi SDA
11	SABRUL, SH NIP. 19651231 198601 1 033	Kepala Bagian Hukum	Kuasa Pengguna Anggaran	Program Advokasi Pemerintah Daerah 1. Penyelesaian Sengketa Hukum Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan 2. Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati 3. Validasi Keputusan Bupati dan Evaluasi/Klarifikasi Peraturan Nagari 4. Fasilitas Pelaksanaan dan Pelaporan Ranham
12	DAPMADI, S.Sos NIP. 19700613 199203 1 003	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1. Penilaian Kompetensi Camat dan Perangkatnya

13 YOLLI AANG SOFRIA, S.STP.,M.Sc NIP. 19840723 200212 1 001	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kuasa Pengguna Anggaran	Program Pemantapan Otonomi Daerah 1. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2. Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah 3. Fasilitasi Penguasaan Batas Daerah dan Keamanan 4. Fasilitasi Kerjasama Rantau 5. Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan 6. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 7. Penamaan Rupa Bumi dan Unsur Alam Program Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Aparatur 1. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPU) Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1. Monitoring dan Evaluasi Unit Kesehatan Sekolah (UKS) Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga 1. Pemasarakan Olahraga Aparatur Program Peningkatan IMTAQ 1. Peningkatan IMTAQ Bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Penyelenggaraan Hari Besar Islam 2. Safari Keagamaan Pemerintah Daerah 3. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ 4. Fasilitasi Pelayanan Jemaah Haji Kabupaten Pesisir Selatan 5. Pembinaan Didikan Subuh Terget 6. Koordinasi dan Konsultasi Kesejahteraan Rakyat dan Urusan Keagamaan 7. Verifikasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 8. Pembinaan Pondok Pesantren, MDTA, dan Pondok Al-Qur'an Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1. Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan 2. Operasionalisasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Program Pemeliharaan Kantantubmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1. Koordinasi dan Konsultasi Pemeliharaan Kantantubmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 2. Operasionalisasi Unit Bantuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Pesisir Selatan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 1. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 1. Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
14 HARDI DARMA PUTRA, SH.,M.Si NIP. 19670901 198602 1 001	Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik	Kuasa Pengguna Anggaran	

			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1. Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya Program pendidikan politik masyarakat 1. Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Ormas/LSM 2. Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik 3. Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai 4. Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah
15	NOFRUDIANTO, A.Md. NIP. 19790520 201101 1 008	Staf Bagian Keuangan	Bendahara Pengeluaran
16	SYAFNEL, SE NIP. 19791127 200701 2 003	Staf Bagian Umum	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bupati dan Wakil Bupati
17	GUSRIKA YENTI, A.Md NIP. 19780403 200902 2 002	Staf Bagian Umum	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum
18	MISNURMALLYANTI, S.E NIP. 19710228 200604 2 012	Staf Bagian Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bendahara Gaji)
19	YULI FITRIANI NIP. 19850723 201001 2 019	Staf Bagian Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Lingkup Asisten I 1. Bagian Hukum 2. Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat 4. Bagian Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
20	MART IKHSAN, SE NIP. 19780311 200902 1 009	Staf Bagian Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Lingkup Asisten II 1. Bagian Pembangunan dan Infrastruktur 2. Bagian Perencanaan dan Sumber Daya Alam 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

1	2	3	4	5
21	SILVI YANUR NIP. 19850304 201001 2 029	Staf Bagian Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Lingkup Asisten III 1. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol 2. Bagian Organisasi	

